

“YANG-TETAP” DAN “YANG-BERUBAH” DALAM PERSPEKTIF METAFISIKA PANCASILA

Oleh: Djoko Pitojo¹

Abstract

The paper will tries to review classical debate about “the stable” and “the change” and discuss every notion in their variants. Description about the debate among philosophers will express chronologically as possible. Last but not least, it tries to express “the stable” and “the change” in Philosophy of Pancasila perspective. Pancasila, in its position as a *genetivus objectivus*, is very interesting to interpreted continuously; in order to do it, we must neither to maintain “the stabile” as a “glorious” in the one hand nor merely want to make it “change” in the other hand. For both attitudes are naïve and irresponsible. Pancasila, as a life symbol, must be actualized and interpreted openly, dialogically and there is no place for monopoly in interpretation. While, Pancasila as a *genetivus subjectivus*, give answer to the developing and management of state problems, unavoidably, the changes are always as assumption. “The stable” is “being” itself with its identity and developing; and that is meaning its existence. The ethical implication, therefore, is commitment to values inhering on the existence of being itself. “The change” is the way to handle of being and its technical management.

Keywords: Pancasila, the stable, the changing, reality, being.

A. Pendahuluan

Sejak menjelang kelahirannya, yaitu pada saat-saat Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), apa yang kemudian populer disebut Pancasila, telah menjadi perbincangan hangat. Kehangatan perbincangan itu wajar, karena ketika itu Bangsa Indonesia yang hendak menegara sedang berusaha merumuskan apa yang oleh Sukarno disebut sebagai *filosofische grondslag*. Sukarno menekankan bahwa yang mau dirumuskan dengan nama itu maksudnya ialah fondamen, filsafat, pikiran-yang-sedalam-dalamnya, hasrat-yang-sedalam-dalamnya

¹ Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

untuk di atasnya didirikan “gedung” Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi (Sukarno, Pidato 1 Juni 1945).

Dengan proses yang panjang dan berliku, akhirnya pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, PPKI mengesahkan UUD Negara yang di dalam Pembukaannya terdapat rumusan Pancasila sebagaimana yang dikenal sekarang. Karena forum BPUPKI (tempat menampung berbagai usulan seputar calon dasar negara, memperdebatkannya, dan kemudian merumuskannya) dan forum PPKI (tempat “pembesutan” akhir dan pengesahan calon dasar negara menjadi dasar negara) adalah forum politik, maka Pancasila sebagai salah satu hasil dari forum itu dapat pula disebut sebagai *political consensus*. Akan tetapi, *in absracto* Pancasila adalah juga *philosophical consensus* (Soejadi dan Koento Wibisono, 1986: 16).

Dalam perjalanan sejarah, Pancasila mengalami banyak penafsiran. Menurut Pranarka, penafsiran atas Pancasila itu acapkali didasari asumsi bahwa Pancasila itu lebih merupakan “wadah” daripada “isi”. Akibatnya, setiap orang atau kelompok orang (biasanya kelompok politik tertentu) merasa berkompeten untuk memberi “isi” kepada “wadah” Pancasila itu (Pranarka, 1985: 301-dst). Ketika masa Orde Baru, misalnya, lahirlah beberapa produk hukum yang mencoba memberi tafsir atas Pancasila walaupun seringkali lebih bersifat implisit (umpamanya saja TAP NO. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang ketika itu populer disingkat P-4, yang di dalamnya dikatakan bahwa TAP MPR itu bukanlah tafsir Pancasila sebagai dasar negara, namun isinya jelas-jelas mencoba menjabarkan sila-sila Pancasila dalam rumusan praktis bagi pedoman hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat).

Apabila sejak kelahirannya Pancasila sudah ditetapkan sebagai dasar filsafat (*filosofische grondslag*), maka sebagai konsekuensinya diperlukan refleksi filosofis atas Pancasila secara lebih serius. Hal ini penting, karena pada satu masa, lebih-lebih di masa Orde Baru, Pancasila – entah lebih berbau politis atau pun akademik – telah dilekati begitu banyak predikat: Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai cita-cita bangsa, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur bangsa, sebagai landasan moral pembangunan, sebagai ideologi negara, dan entah berapa “sebagai” lagi yang dipredikatkan kepada Pancasila. Tidak

begitu jelas, apakah setiap predikat yang dilekatkan kepada Pancasila selalu dibarengi dengan kajian yang serius, ataukah sekadar pengayaan predikat yang “sloganistik” belaka. Jikalau sinyalemen itu benar, maka tentu terdapat sederetan permasalahan yang membutuhkan penggarapan sebagaimana mestinya, atau lebih tajam lagi, membutuhkan penanganan akademik-filosofis yang memadai.

1. Rumusan masalah

Pertama, kalau Pancasila dipandang sebagai Filsafat, maka akan muncul dua status, yaitu Pancasila sebagai *Weltanschauung* atau Pancasila sebagai sistem filsafat “yang ilmiah” sebagaimana sistem filsafat mapan yang lain. Dalam statusnya yang pertama, dibutuhkan kajian atas Pancasila dengan perspektif sosio-kultural secara memadai. Sedangkan dalam statusnya yang kedua, diperlukan kajian atas Pancasila dalam perspektif filosofis ilmiah secara seksama. Permasalahan dalam karangan ini lebih difokuskan kepada status kedua Pancasila, yakni sebagai sistem filsafat. Dengan demikian, pertanyaan yang mengemuka ialah: “Bagaimanakah pandangan Filsafat Pancasila tentang realitas?” Lebih khusus lagi, bagaimanakah sosok metafisika Pancasila?

Kedua, dalam khasanah metafisika terdapat berbagai persoalan abadi, misalnya saja tentang “yang-transenden” dan “yang-imanen”, “yang-satu” dan “yang-banyak”, “yang-tetap” dan “yang-berubah”, dan sebagainya. Jikalau Pancasila diasumsikan sebagai nilai dasar (*basic values*) bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan kehidupan senantiasa melayari samudera perubahan, maka pertanyaan yang mendesak untuk dijawab ialah: “Apa yang dapat diberikan oleh Filsafat Pancasila dalam memenuhi tuntutan prinsip dasar tentang perubahan?” Dalam khasanah metafisika, tuntutan itu mau tidak mau harus dijawab dalam kancah perdebatan tentang “yang-tetap” dan “yang-berubah”.

2. Asumsi dasar

Dibyasuharda dalam disertasinya berjudul **Dimensi Metafisik dalam Simbol: Ontologi mengenai Akar Simbol** di antaranya menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai simbol memberi dasar dinamika dan vitalitas kehidupan dalam segala bidang khas Indonesia. Sebagai simbol, Pancasila tidak hanya

mengundang untuk berpikir, tetapi juga mendorong tindakan keputusan tentang budaya yang “sedang menjadi” sesuai bahan yang diberikan oleh Pancasila untuk dipikirkan. Pancasila sebagai simbol juga memberi dasar pemikiran “Filsafat Pancasila” dalam arti *genetivus subjectivus* (Dibyasuharda, 1990: 240).

Lebih lanjut Dibyasuharda mengatakan bahwa Pancasila sebagai simbol yang hidup menuntut dirinya diperlakukan sebagai partner dialog dalam pembangunan. Pembangunan bukanlah untuk pembangunan itu sendiri, tetapi pembangunan Indonesia adalah pengejawantahan apa yang diungkap Pancasila. Pancasila tidak hanya pada awal pembangunan atau akhir pembangunan, tetapi sebagai partner dialog selalu hadir di samping pembangunan; ia memberi nasihat, memberi koreksi, dan memberi kedamaian (Dibyasuharda, 1990:240-241).

Soejadi dan Koento Wibisono mengatakan bahwa menilik berbagai pemikiran yang berkembang dalam berbagai sidang BPUPKI, Pancasila dimaksudkan sebagai dasar falsafah (*filosofische grondslag*) dan sekaligus pandangan hidup (*Lebensanschauung*) dan pandangan dunia (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia, maka Pancasila adalah sekaligus sistem filsafat yang dimaksudkan melandasi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam wadah Negara Indonesia merdeka. Lebih lanjut dikatakan pula bahwa dengan demikian Pancasila menjadi pokok pangkal dan sudut pandang yang melandasi pemikiran dan sikap serta tingkah laku bangsa Indonesia, terlebih lagi dijadikan landasan dalam mencari jawab atas berbagai masalah fundamental tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam semesta, dan dengan dunia manusia termasuk hubungannya dengan dirinya sendiri (Soejadi dan Koento Wibisono, 1986: 16-17).

Berdasar atas uraian di atas, maka dapatlah diasumsikan bahwa, **pertama**, Pancasila itu merupakan satu sistem filsafat dalam arti bukan hanya sebagai *genetivus objectivus*, melainkan juga sebagai *genetivus subjectivus*. Sebagai *genetivus subjectivus*, Pancasila bukanlah wadah semata-mata, melainkan mengandung isi (ajaran) filosofis tertentu. **Kedua**, sebagai sistem filsafat, Pancasila tentu memiliki pendirian atau pandangan tertentu tentang realitas. **Ketiga**, baik dalam kapasitasnya sebagai dasar (filsafat) negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, terlebih dalam arus perubahan yang acapkali “anomalistik” seperti

dewasa ini, maka Pancasila diasumsikan mampu memberi jawaban atas berbagai persoalan fundamental yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam masa “pancaroba” dari zaman Orde Baru ke zaman Reformasi seperti dewasa ini. Itu berarti bahwa, dari sudut kajian metafisik, persoalan mendesak yang harus diberi jawaban ialah masalah fundamental tentang “yang-tetap” dan “yang-berubah” dalam rangka hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Fokus kajian dan buah yang diharapkan

Kajian karangan ini lebih difokuskan kepada masalah mendasar tentang realitas. Oleh karena itu, masalah yang bersifat praktik-operasional sengaja tidak diberi perhatian yang cukup. Sikap ini diambil, mengingat karangan ini hanya mau merefleksikan realitas secara metafisik. Seandainya dalam uraian nanti terdapat serba sedikit hal yang kurang lebih bersifat praktik-operasional, hal itu lebih merupakan upaya untuk menunjukkan implikasi atau konsekuensi logis dari pandangan dasar yang dimunculkan dalam refleksi. Lagi pula, peristiwa praktik-operasional yang mungkin akan dipaparkan hanyalah bersifat ilustratif belaka.

Buah yang diharapkan dari kajian ini ialah eksplisitasi pandangan Pancasila dalam memberikan jawaban atas persoalan “yang-tetap” dan “yang-berubah”. Rumusan atas pendirian pandangan Pancasila atas “yang-tetap” dan “yang-berubah”, diharapkan dapat memberi acuan atau pedoman dasar ontologik bagi penyusunan program kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara lebih memadai

B. Perdebatan tentang Konsep “Yang Tetap” dan “Yang-Berubah”

Para filsuf Yunani Kuno Pra-Sokratik berusaha keras mencari jawab atas persoalan prinsip dasar (*arkhè*) yang mendasari segenap realitas. Thales mengatakan bahwa *arkhè* itu air, Anaximandros mengatakan *to apeiron* (yang tak terbatas) sebagai *arkhè*, Anaximenes meyakini udara sebagai *arkhè*. Ajaran para filsuf Ionia itu boleh dikatakan sebagai jawaban atas ketakjubannya terhadap gejala alam yang berubah-ubah, silih bergantinya siang dan malam, dan bergantinya musim. Kalau harus dirumuskan, agaknya pertanyaan yang menantang para filsuf awal

itu kurang lebih berbunyi: Bagaimanakah dapat kita mengerti terjadinya perubahan pada alam semesta ini? Apakah kiranya di belakang perubahan itu terdapat sesuatu yang tetap? (Bertens, 1979: 32).

Atas berbagai jawaban yang diberikan oleh para filsuf Yunani Pemula itu, Bertens merangkumkannya sebagai berikut: (1) bahwa di mata para filsuf itu, alam semesta dipandang sebagai keseluruhan yang bersatu dan oleh karenanya harus diterangkan dengan menggunakan satu perinsip saja, meskipun mereka tidak sependapat tentang prinsip itu, (2) alam semesta dikuasai oleh satu hukum; kejadian dalam alam tidak kebetulan saja, melainkan terdapat semacam keharusan di belakang kejadian itu. Konsekuensinya, (3) alam semesta itu merupakan *kosmos*, yaitu “dunia yang teratur” (Bertens, 1979: 32-33).

Betapa pun naifnya pandangan para filsuf awal itu di mata orang modern kini, namun mereka telah berjasa menjadi perintis dalam penggunaan *logos* (λογος) untuk berspekulasi dalam memahami realitas sebagai tandingan pemahaman realitas yang telah diberikan oleh *mitos* (μιτος). Di sini pulalah mulai muncul gagasan tentang “yang-tetap” dan “yang-berubah”. Agaknya, bagi para filsuf awal ini, “yang-berubah” ialah gejala alam yang tertangkap indera, sedangkan *arkhè*-nya tetap. Dengan perkataan lain, di balik keanekaragaman alam terdapat prinsip ke-eka-an yang mendasarinya. Pendirian ini, apabila harus didesak, maka pada babak terakhir keyakinannya ialah bahwa pada dasarnya asas realitas itu lebih bersifat “materialistik”, “bahani” (De Vos, t.t.:6).

Di samping para filsuf yang mengasalkan seluruh alam semesta dari satu asas, terdapat pula filsuf Yunani Kuno yang mengasalkan realitas dari banyak anasir. Sebut saja misalnya Empedokles dengan ajarannya tentang *rizomata*, Anaxagoras dengan *spermata*-nya, dan yang kemudian begitu terkenal ialah Leukippos dan Demokritos dengan ajaran mereka tentang *atomos*. Para filsuf itu, dalam khasanah metafisika biasanya digolongkan dalam kelompok pluralis (Bertens, 1979:53-dst.). Bagaimana pandangan mereka pada umumnya tentang perubahan? Apabila dicermati dengan seksama, “bahan” azali alam semesta ini bagi mereka merupakan zat yang tidak diciptakan, tidak dapat musnah, dan tidak berubah (Bertens, *ibidem*). Lebih mencolok lagi adalah ajaran Demokritos tentang atom. Bagi Demokritos, segala sesuatu itu tidak lain terdiri atas atom-atom. Keanekaragaman segala

sesuatu yang menggejala hanyalah disebabkan oleh jumlah, besar, bangun, dan susunan atom yang bervariasi (De Vos, t.t.: 7). Jadi, “yang-tetap” adalah atom-atom itu sendiri, sedangkan bila dituntut pertanyaan apa “yang-berubah”, maka jawabannya ialah jumlah, gerak, posisi, besaran, dan sebagainya. Pendek kata, perubahannya hanyalah “mekanistik-kuantitatif” dan secara hakiki tidak terdapat baik itu “perkembangan” maupun “penyurutan” kualitatif apa pun.

Tokoh penting yang harus disebut dalam diskusi ini ialah Herakleitos. *Arkhe* bagi Herakleitos ialah api. Api yang dimaksud tidaklah sepadan dengan air atau udara sebagaimana dikatakan oleh para filsuf terdahulu. Api bagi Herakleitos lebih merupakan lambang perubahan. Herakleitos sendiri mengatakan: “Ada satu pertukaran: semua benda ditukar dengan api dan api ditukar dengan semua benda, seperti barang dengan emas dan emas dengan barang (Bertens, 1979: 45). Ia berpendirian bahwa realitas itu senantiasa berubah, tiada yang tinggal tetap, bagaikan arus sungai yang mengalir. Salah satu ucapan Herakleitos yang amat terkenal: “Engkau tidak bisa turun dua kali ke dalam sungai yang sama”. Maksudnya, ketika orang turun ke sungai untuk kedua kalinya, air yang dijumpainya bukanlah air yang dijumpainya pada saat turun yang pertama – air itu telah berganti. Menurut tuturan tradisi, ajaran Herakleitos itu terkenal dengan ungkapan: *panta rhei kai uden menei* (Bertens, 1979: 44). Hal penting yang harus dieksplisitkan ialah Herakleitos berpendirian bahwa realitas itu senantiasa berubah, tiada sesuatu yang tetap. “Yang-ada” itu berubah, atau lebih baik disebut “yang-ada” itu perubahan itu sendiri, “yang-tetap” ialah perubahan itu sendiri.

Lawan utama pendirian Herakleitos adalah kelompok Mazhab Elea dengan dua tokoh besarnya: Parmenides dan Zeno. Bagi Parmenides, “yang-ada” itu ada, *what is, is*. Mustahillah mengingkari kenyataan ini. Boleh jadi orang mengingkari kenyataan ini dengan dua pengandaian: (1) Orang dapat mengemukakan bahwa “yang-ada” itu tidak ada, atau (2) Orang dapat mengatakan bahwa “yang-ada” itu serentak ada dan tiada. Pengandaian yang pertama harus ditolak, karena yang tidak ada itu justru tidak ada. “Yang-tidak-ada” itu tidak dapat dipikirkan. Kalau ada orang mengatakan bahwa realitas seluruhnya terdiri atas kenyataan bahwa tidak ada sesuatu pun, maka orang yang demikian itu akan terjatuh pada kontradiksi yang absurd. Pengandaian kedua pun tidak kalah absurdnya. “Yang-ada” itu

ada, "yang-tidak-ada" tidak ada. Antara dua pernyataan itu tidak ada jalan tengah. Karena "yang-ada" ada, maka tidak pernah mungkin menjadi "tidak-ada". Dan, karena "yang-tidak-ada" tidak ada, akibatnya tidak pernah mungkin menjadi "yang-ada" (Bertens, 1979: 47).

Konsekuensi lebih jauh dari pendirian Parmenides itu ialah bahwa "yang-ada" adalah satu dan tak terbagi. Pluralitas tidak dimungkinkan, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan "yang-ada". Selanjutnya, "yang-ada" tidak dijadikan dan tidak termusnahkan. Dengan demikian, "yang-ada" bersifat kekal dan tak terubahkan. Sebab, seandainya ada perubahan, itu berarti bahwa "yang-ada" menjadi "yang-tidak-ada" atau "yang-tidak-ada" menjadi "yang-ada". Ini benar-benar mustahil. Jadi, perubahan itu tidak mungkin. Konsekuensi lebih jauh lagi, "yang-ada" itu telah utuh sempurna, tiada sesuatu pun yang dapat ditambahkan atau dikurangkan atasnya. Pendek kata, "yang-ada" itu 'bulat-utuh', sehingga tidak dimungkinkan adanya ruang kosong, karena "yang-ada" menempati seluruh ruang (Bertens, 1979: 47-48). Sekali lagi, di sini tampak jelas bahwa Parmenides memustahilkan gerak, memustahilkan perubahan, karena setiap gerak atau perubahan mengandaikan adanya ruang sebagai wahananya.

Zeno, murid Parmenides, dengan semangat yang sama dengan gurunya, juga mengajukan argumentasi menentang adanya ruang kosong, pluralitas, dan gerak. Ruang kosong itu mustahil, karena bila ada ruang kosong, tentu ruang itu menempati ruang kosong lainnya; dan ruang kosong lainnya itu juga harus menempati ruang kosong lain lagi, begitu seterusnya sampai tak terhingga. Ini sungguh tidak masuk akal! Kalau begitu, harus disimpulkan, bahwa ruang kosong itu tidak pernah ada. Pluralitas juga ditolak. Zeno melawan pluralitas dengan argumentasi garis dan titik. Jika sepotong garis terdiri atas titik-titik, maka potongan garis itu dapat dibagi-bagi. Karena setiap bagian sekurang-kurangnya mempunyai titik ujung dan titik pangkal, maka pembagian dapat diteruskan sampai tak terhingga. Kalau begitu, maka potongan garis itu terdiri atas titik-titik yang tak terhingga jumlahnya. Persoalannya, apakah titik-titik itu mempunyai panjang tertentu atau tidak? Kalau ia mempunyai panjang tertentu, maka harus disimpulkan bahwa potongan garis itu tak terhingga panjangnya. Tetapi jika titik-titik itu tidak mempunyai panjang

tertentu, maka harus disimpulkan bahwa potongan garis itu tak terhingga pendeknya, atau bahkan sama dengan nol. Dengan demikian, nyatalah bahwa kedua-duanya sama mustahilnya, karena pada kenyataannya satu potongan garis tentu mempunyai panjang tertentu. Maka, sebagai konsekuensinya, pluralitas harus ditolak. Argumentasi berikutnya ialah melawan gerak. Dengan mengandaikan beberapa contoh (pelari dalam stadion, Akhilles dan kura-kura, anak panah, dan tiga deretan yang berjalan), Zeno akhirnya menyimpulkan bahwa gerak itu tidak ada. Apa yang tertangkap pancaindera sebagai “gerak”, itu hanyalah deretan perhentian (Bertens, 1979:50-52).

Agaknya terdapat paralelitas antara “yang-tetap” dengan monisme dan “yang-berubah” dengan pandangan pluralisme, sekurang-kurangnya ini sebagai anggapan sementara yang masih tentatif. Silang pendapat antara Herakleitos di satu pihak dan Parmenides beserta Zeno di lain pihak, kelak akan dicoba diatasi oleh Plato dengan ajarannya tentang ide. Pada Plato kita akan dapati satu metafisika yang bernuansa lain daripada pandangan para filsuf Pra-Sokratik. Para filsuf awal titik fokus pemahamannya semata-mata ‘bahani’, karena mereka belum memisahkan atau membedakan antara yang material dan yang spiritual. Akan tetapi, pada Plato masalah itu dipikirkan dengan serius.

Bagi Plato, apa yang diyakini Herakleitos tidak semuanya keliru. Begitu pula, apa yang diyakini Parmenides juga tidak seluruhnya salah. Memang, dunia pengalaman kita sehari-hari memberikan gambaran adanya perubahan. Tetapi akal kita cenderung memahami bahwa realitas yang sesungguhnya itu tetap. Plato mengontraskan antara “ada” dan “menjadi” (*being and becoming*). Konsep “menjadi” mencakup segala hal yang berubah dan dapat tertangkap oleh indera. Namun pengetahuan akan objek semacam itu tidak memuaskan. Akal kita menghendaki bukan “yang-menjadi”, melainkan “yang-ada”, *Being*. “Hence, Plato was convinced that knowledge must be directed to Being. For him, Being was constituted by the world of Form: the patterns of all visible things, Ideas both eternal and immutable in their nature (Sontag, 1970: 32). Idelah yang menjamin ketetapan, kepastian. Pengetahuan akan *being* ini oleh Plato disebut *epistemè*, sedangkan pengetahuan akan *becoming*, segala yang inderawi, yang berubah, disebut *doxa* (Bertens, 1979: 107). *Epistemè*-lah, dan bukan *doxa*,

yang menjamin pengetahuan kita tentang realitas sesungguhnya: Dunia Ide.

Dunia yang real, bagi Plato, adalah dunia ide tersebut; sedangkan “dunia ini”, yang kasat mata ini, hanyalah “bayangan” yang dilekati sifat berubah-ubah. Dengan demikian, apabila hal ini dibawa ke persoalan “yang-tetap” dan “yang-berubah”, maka yang tetap ialah realitas yang sebenarnya, yaitu “dunia idea”. Perubahan yang kita kenal hanyalah pengetahuan semu, *doxa*. Yang-tetap (ide-ide) adalah “patron” bagi yang-berubah (dunia empirik, dunia ini); dan yang-berubah merupakan partisipan yang-tetap. Mengingat yang-berubah itu wujud yang beraneka ragam, dan setiap wujud adalah “bayangan” atau partisipan dari dunia ide, maka Plato mencoba membuat hirarkhi ide-ide. Pada titik ini, agaknya Plato mau tidak mau mengakui pluralitas. Akan tetapi, pada akhirnya, di puncak hirarkhi ide yang disusunnya, Plato mengatakan bahwa di antara banyak ide yang dijenjangkan, terdapat ide tertinggi, yaitu ide “yang-baik” (*summum bonum*).

Di kemudian hari, salah seorang penganut Plato dan sekaligus pendiri Mazhab Neo-Platonisme, Plotinos, mencoba mengupayakan persatuan, atau lebih baik disebut kesatuan akan realitas pada *To Hen* (“Yang Esa”). Dengan teori emanasinya, Plotinos hendak menyatakan bahwa realitas itu tunggal. Segala sesuatu yang tergelar di dunia ini tidak lain merupakan hasil “limpahan” *To Hen*. Dan, lewat jalan-jalan tertentu, kelak pada akhirnya mereka akan kembali kepada *To Hen* (Bertens, 1981: 18-19). Tampaklah monisme Plotinos ini mengadaikan bahwa realitas itu tetap; walaupun terdapat perubahan, itu hanyalah ekspresi ekstern dari *To Hen*. Sekali lagi dapat ditunjukkan, bahwa pandangan yang monistik cenderung berpendirian bahwa realitas itu “tetap”.

Pandangan Plato yang meneguhkan keberadaan dunia ide yang tetap dan teguh, yang membawa konsekuensi “maya”-nya dunia yang tercerap indera ini, mengakibatkan pandangannya disebut idealistik. Aristoteles, murid Plato, menolak pendirian gurunya itu. Aristoteles berpendirian bahwa memahami barang sesuatu bukanlah mencoba menelusuri dunia ide yang entah di mana. “yang-tetap” bukanlah ide yang menjadi patron bagi benda-benda, melainkan bendanya itu sendiri, yaitu substansinya. Sedangkan “yang-berubah” ialah aksidensi benda itu. Selain itu benda atau hal bukanlah partisipan dari dunia ide (sebagaimana

diyakini Plato), bukan pula sebagai limpahan *To Hen* (sebagaimana diajarkan Plotinos), melainkan sungguh-sungguh eksis berdasarkan kausa yang menyebabkan perwujudannya, yaitu kausa material, kausa formal, kausa efisien, dan kausa final (Bertens, 1979: 141; Bdk. Sontang, 1970: 47).

Dari jurusan lain, dapat disimak pula bagaimana pendirian Aristoteles tentang “gerak” atau “perubahan”. Bila Parmenides hanya membedakan “yang-ada” dari “yang-tidak-ada”, maka Aristoteles membedakan “yang-ada-menurut-potensi” dari “yang-ada-menurut-aktus”. Bagi Aristoteles, perubahan atau gerak memang terjadi, yaitu peralihan dari potensi ke aktus, atau dari *dynamis* ke *entelekeia*. Berkait erat dengan pembedaannya tentang potensi dan aktus, Aristoteles juga membedakan bentuk (*eidos* atau *morphe*) dari materi (*hyle*). Meskipun dibedakan, namun kedua konsep itu bersifat korelatif: “Yang satu tidak pernah terlepas dari yang lain”. Sejatinya, setiap barang sesuatu pasti memiliki materi dan bentuk. Andai harus terjadi perubahan, benda yang telah berwujud itu menjadi materi baru yang siap diberi bentuk (baru) lagi. Jadi, menurut Aristoteles, di dalam perubahan senantiasa tersangkut tiga faktor, yaitu keadaan yang dahulu, keadaan yang kemudian, dan semacam substratum tetap (Bertens, 1979: 139-140).

Jikalau gerak memang dapat terjadi secara terus-menerus, tambahan lagi Aristoteles berpendirian bahwa materi itu tetap dan kekal, maka persoalan yang menantang ialah bagaimana semua itu mungkin? Apakah dunia ini bersifat mekanistik dan meMbuta?

Bukankah Aristoteles juga berkeyakinan bahwa segala hal pada dasarnya mewujudkan secara teleologis? Di sinilah Aristoteles mengemukakan konsepnya tentang “Sang Penggerak yang Tak Digerakkan”, *The Unmoved Mover* (Sontang, 1970: 52-54).

Perdebatan tentang “yang-tetap” dan “yang-berubah” sebenarnya dapat dirunut hampir di sepanjang sejarah filsafat. Namun demikian, rasanya terlampau ambisius bila karangan pendek ini menelusurnya secara lengkap. Dengan menampilkan beberapa pemikiran sebagaimana dipaparkan di depan, diharapkan telah dapat memberikan semacam stimulasi bagi refleksi metafisika Pancasila.

C. “Yang-Tetap” atau “Yang-Berubah”?

Apa yang telah dipaparkan di depan memberikan pemahaman bahwa persoalan “yang-tetap” dan “yang-berubah” memang merupakan persoalan metafisik yang telah lama diperdebatkan dengan hangat oleh para filsuf. Kehangatan perdebatan itu dapat dimengerti karena hal ini merupakan perdebatan yang menyangkut keyakinan dasar akan realitas.

Segolongan filsuf bersiteguh bahwa realitas itu “tetap”, tiada berubah, tak bergeming. Sementara segolongan filsuf yang lain berpendirian bahwa realitas itu “berubah”, menjadi, *becoming*. Plato dan Aristoteles telah mencoba menjembatani kedua pendirian yang berbeda secara diametral itu dengan caranya masing-masing. Plato mengambil haluan ke arah idealis, sedangkan Aristoteles ke arah realis. Akan tetapi, masing-masing seakan-akan dipaksa untuk lebih berpihak kepada salah satu pendirian: lebih ke “yang-tetap” atau “yang-berubah”.

Apakah dengan konstelasi semacam ini lantas setiap orang harus “ditodong” juga untuk lebih berpihak kepada satu pendirian dan berhadap-hadapan dengan pendirian yang lain? Jikalau orang kembali kepada kehidupannya yang otentik, apakah makna dari dua pendirian itu? Secara eksistensial, setiap orang merasa bahwa “dalam kedirianku, aku otonom”. Dari lain pihak, “otonomiku baru menjadi sungguh otonom sejauh aku berkorelasi dan berkoeksistensi dengan yang lain, bahkan dengan yang sama sekali lain”. Pun pula, manusia mengalami diri dalam sekarangnya. Tetapi sekaranku itu bukanlah statis, mati, beku. Setiap saat aku keluar dari sekaranku yang kini dan menjadi sekaranku yang berikutnya; aku “keluar” dari diriku sendiri, namun sekaligus aku “tetap” aku seutuhnya. Aku kini berciri *continuum*, tetapi selalu beralih ke “eksistensi lain” (Bakker, 1992: 87). Kalau begitu, aku senantiasa dalam kebaruan dan sekaligus dalam ketetapan. Lantas apa makna tetap dan baru/berubah itu?

Perlangsungan itu, demikian Bakker, bukan hanya pengulangan atas hal yang sama belaka, melainkan selalu terjadi peningkatan dan perbaruan. Dengan tetap tinggal diriku sendiri, lanjut Bakker, aku selalu lagi mengatasi rutinitas, dan meloncat menjadi baru. Permanensiku hanya dapat dipertahankan, oleh karena aku mengolahnya dan meninjaunya kembali dengan terus-menerus dalam insidensi-insidensi baru. Sebaliknya, pengolahan kembali itu benar-benar pengolahan dan penggarapan dan bukan hanya penggantian, oleh karena dengan tetap dirangkul oleh

identitasku yang permanen. Aku selalu baru, namun tetap sama juga dan berlangsung terus. Maka, sekarangku bersifat dinamis dan berkembang; aku memuncak dalam insidensi-insidensi baru yang terus-menerus. Dan, bersama dengan sekarangku, juga masa lampauku dan masa depanku berkembang (Bakker, 1992: 88).

Lebih jauh Bakker mengatakan bahwa permanensi yang berlaku bagi manusia menurut intinya berlaku bagi segala pengada. Pengada lain selalu berhadapan dengan sekarangku, dalam satu ketetapan. Mereka masing-masing memiliki konsistensi pribadi, dan mempertahankan dirinya sendiri di hadapan sekarangku. Mereka tidak begitu saja menjadi 'yang-lain'. Mereka hanya dapat menampung dirinya sendiri, dan melanjutkan dirinya sendiri, dengan tetap mempertahankan identitas-diri di depan kini-ku.

Akan tetapi, dari lain pihak, permanensi itu bukan steril dan mati. Setiap pengada menurut kepadatan mengadanya, berhadapan dengan sekarangku dan bersama dengannya, mengalami kebaruan pula. Permanensi mereka sendiri hidup dan bersegar-segar. Dalam perlangsungannya, mereka melakukan diri lagi sebagai 'sekarang' baru; mereka semua dinamis pula. Dinamika pengada itu tidak dengan langsung menunjukkan satu urutan. Dinamika itu pertama-tama termuat dalam kini pengada. Sekarangnya yang dialaminya dengan serentak itu penuh vitalitas; di dalamnya pengada sendiri berdebar-debar dan seakan-akan mau 'meledak'. Justru kini pengada sendiri itu sekaligus sama dan baru (Bakker, 1992: 88-89)

Dengan demikian, antara permanensi dan kebaruan tidak bisa dilawankan, misalnya dengan cara melokalisasikan permanensi dalam hakikat pengada, dan menempatkan kebaruan dalam insidensi-insidensi. Satu-satunya kenyataan pengada ialah sekarangnya sebagai identitas-diri. Sekarang itulah sekaligus sama (lama) dan baru, di dalam dinamika setiap pengada, kedua segi itu sejajar dan sama derajatnya. Pengada itu untuk seratus persen adalah sama, dan untuk seratus persen adalah baru. Mengadanya substansi itu adalah sama (menjadi diri) sejauh ia baru; dan pengada itu baru sejauh ia tetap sama menjadi diri. Justru dalam kesatuan dialektis itu, kedua kutub itu membentuk dinamika pengada. Jadi, kalau permanensi menjadi besar dan berbobot, maka juga aspek kebaruan itu akan kuat. Jika kebaruan itu hanya lemah saja, maka permanensinya juga berderajat rendah (Bakker, 1992: 89).

Apabila refleksi Anton Bakker sebagaimana dikutip panjang lebar di atas tadi diikuti dan dicermati dengan seksama, maka sesungguhnya persoalannya bukanlah “yang-tetap” atau “yang-berubah”, melainkan baik “yang-tetap” maupun “yang-berubah” kedua-duanya bukanlah merupakan kutub-kutub yang saling mengeksklusikan satu sama lain, melainkan keduanya justru menandai identitas dan sekaligus dinamika “ada”.

D. Pancasila: “Yang-Tetap” dan “Yang-Berubah”

Agar refleksi tentang Pancasila menjadi memadai, maka Pancasila akan didudukkan, baik sebagai *genetivus objectivus* maupun sebagai *genetivus subjectivus*. Sebagai *genetivus objectivus*, berarti Pancasila didudukkan sebagai objek sasaran kajian. Sedangkan sebagai *genetivus objectivus*, Pancasila didudukkan sebagai subjek yang berbicara tentang realitas.

Sebagai *genetivus objectivus*, pancasila sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 itu merupakan satu kristalisasi nilai yang telah disepakati oleh para pendiri Negara Republik Indonesia. Secara demikian, maka seluruh pengelolaan negara, dan juga produk hukum yang dihasilkannya sebagai aturan main dalam pengelolaan negara, harus merupakan derivasi dari nilai-nilai yang terumuskan dalam Pancasila itu. Dengan demikian, sepias lalu, diandaikan terdapat nilai-nilai fundamental yang tetap. Apa yang tetap dan fundamental itu, menurut Notonagoro, ialah hakikat Pancasila yang abstrak-umum-universal. Dalam rangka pengaturan negara, Notonagoro mengajukan konsep pengertian Pancasila yang bersifat umum-kolektif, dan lebih sempit lagi, khusus-singular-kongkret (Notonagoro, 1980: 36-dst.).

Dari segi susunannya, sila-sila Pancasila itu oleh Notonagoro dilukiskan secara berjenjang (hirarkhis) dan bagaikan bangun matematis piramida. Sila pertama menjadi alas atau basis piramida, dan itu berarti melandasi dan menjiwai sila-sila lainnya; dan sila kelima merupakan puncak piramida. Sila pertama mendasari, menjiwai dan meliputi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua didasari, dijiwai, dan diliputi oleh sila pertama; mendasari, menjiwai, dan meliputi sila ketiga, keempat, kelima. Sila ketiga didasari, dijiwai, dan diliputi sila pertama dan kedua; mendasari, menjiwai, dan meliputi sila keempat dan kelima. Sila keempat dilandasi, dijiwai, dan diliputi sila pertama, kedua, dan ketiga; mendasari, menjiwai, dan meliputi sila kelima. Sedangkan

sila kelima didasari, dijiwai, dan diliputi sia pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan, dari segi genetik, Notonagoro menghipotesiskan bahwa bangsa Indonesia itu jauh sebelum menegara telah berpancasila dalam tri prakara: adat-istiadat, kebudayaan, dan keagamaan (Notonagoro, 1980: 32-33).

Secara agak sloganistik, acapkali terdengar bahwa Pancasila itu benar-benar murni digali dari 'bumi' Indonesia sendiri. Akan tetapi, jikalau dikaji dengan seksama, maka tampaklah bahwa para tokoh pengusul dan perumus Pancasila itu bukanlah orang-orang yang "steril" Indonesia. Artinya, mereka juga orang-orang yang belajar dari pemikiran non-Indionesia (baik, Asia maupun Eropa), bahkan sebagian dari mereka benar-benar bersekolah di negara Eropa. Agaknya tidak mustahillah bahwa entah sedikit atau banyak, pemikiran mereka dipengaruhi pula oleh para pemikir manca itu. Dengan demikian, kiranya terlalu dipaksakan kalau harus dikatakan bahwa Pancasila itu semata-mata asli Indonesia, non-reserve! Pertanyaan yang kemudian muncul ialah: Apa yang dimaksud asli? Bukankah kebudayaan etnis-etnis yang hidup di kawasan Nusantara itu juga telah mendapat pengaruh dari berbagai arah dan terus-menerus mengalami perkembangan selama berabad-abad?

Dalam konstelasi semacam itu tampaklah bahwa identitas selalu semakin padat justru dalam kepenuhan perkembangannya, karena diri yang otonom sebenarnya senantiasa dalam korelasi dengan yang lain. Dari jurusan lain, bila diikuti refleksi Bakker sebagaimana digelar di depan, maka kebaruan senantiasa terjadi namun sekaligus juga tetap dalam kesamaan atau ketetapan. Pandangan tentang Pancasila yang terlampau substansialistik bukan saja mengisolasi Pancasila, namun juga sekaligus membekukan dan 'mematikan' Pancasila. Kekayaan dan kepadatan Pancasila justru terletak dalam keterbukaannya dan geliat vitalitasnya untuk senantiasa menjalankan kebaruan, yang dengan demikian akan semakin mengokohkan pula identitasnya.

Maka harus diakui bahwa dalam Pancasila terdapat aspek yang substansial, dan dari lain pihak, terdapat pula aspek relasional; tanpa harus terjatuh dalam paham substansialisme atau pun relasionalisme. Kedua-duanya menunjukkan ekstrimitas yang saling menolak: substansialisme menolak relasi, relasionalisme menolak substansi. Hipotesis Notonagoro tentang triprakara mungkin harus ditambah dengan aspek dinamika Pancasila di masa

kini dan di masa depan. Konsekuensinya, penafsiran atas Pancasila seharusnya juga bersifat dinamik, walaupun rumusan Pancasila yang telah terkodifikasi dalam rumusan legal tetap tak berubah. Studi tentang penafsiran atas Pancasila seperti diteliti oleh Pranarka (1985) memang menunjukkan kecenderungan mengikuti selera dan kepentingan penafsir. Namun bukti itu tidak perlu menjadi penghalang yang traumatik bagi penafsiran Pancasila secara lebih dinamik. Suasana dialogal antarpemafsir perlu diciptakan, agar dengan demikian suasana saling curiga dapat dihindarkan. Tidak seorang pun, bahkan tidak satu lembaga pun yang boleh mengklaim bahwa dirinyalah yang paling berkompeten dalam hal penafsiran atas Pancasila. Kebenaran tidak pernah bisa dimonopoli, bahkan oleh lembaga negara sekali pun. Kebangkrutan sistem komunis di Soviet dan Eropa Timur menunjukkan bahwa monopoli kebenaran dapat membahayakan.

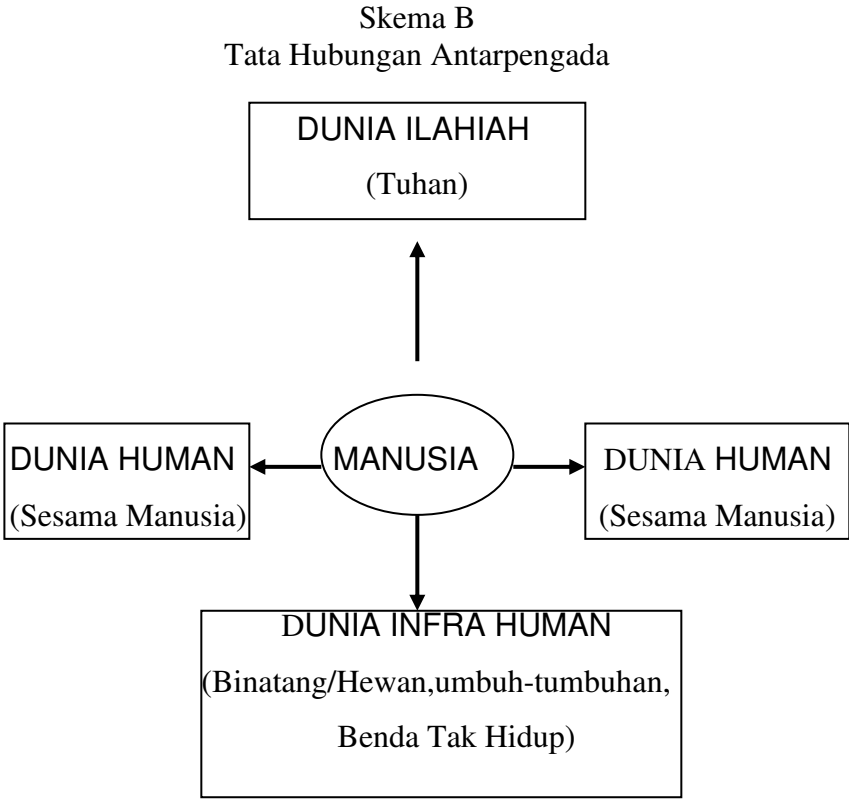
Sekarang tiba saatnya Pancasila didudukkan sebagai *genetivus subjectivus*. Sebagai satu sistem Filsafat, menurut isi kandungannya, Pancasila memandang realitas ini bukanlah monistik, tetapi bukan pula pluralistik. Tuhan dipandang sebagai pengada tertinggi, sementara manusia juga dipandang sebagai pengada yang sungguh eksis, begitu pula dunia infra-human. Maka, jika harus dibuat jenjang pengada, maka yang menempati posisi tertinggi ialah Tuhan. Di bawahnya adalah manusia; lalu di bawah manusia berturut-turut adalah binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak hidup (lihat Skema A).

Skema A
Jenjang-Jenjang Realitas

T U H A N
M A N U S I A
B I N A T A N G / H E W A N
T U M B U H - T U M B U H A N
B E N D A - B E N D A T A K - H I D U P

Berdasar atas penjenjangan realitas seperti itu, maka tantangan berikutnya ialah memetakan “tata hubungan” antarpengada. Hal pertama yang harus diingat ialah bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh manusia dan sekaligus diperuntukkan bagi manusia. Konsekuensinya, manusia menjadi

titik sentrum dalam pemetaan tata hubungan antarpengada. Sebagai titik sentrum, manusia tepat berada di tengah. Secara vertikal, ke atas manusia berhubungan dengan “Dunia Ilahiah”, yakni Tuhan. Ke bawah, manusia berhubungan dengan “Dunia Infra Human”, yang mencakup baik yang bersifat organik (binatang dan tumbuh-tumbuhan) maupun yang bersifat inorganik (benda tak hidup). Sedangkan secara horizontal, manusia berhubungan dengan “Dunia Human”, yakni sesama manusia (lihat Skema B).



Karena dalam pemetaan tata hubungan antarpengada posisi manusia menjadi titik sentrum, maka sikap dan tindakan manusia terhadap pengada lain harus dirumuskan dengan seksama. Secara vertikal, kepada Tuhan, manusia dituntut sikap menghamba dan bertindak taat kepada Tuhan. Terhadap sesama manusia, ia dituntut untuk sikap menjunjung tinggi kebersamaan dan bertindak kerja

sama dengan sesama. Sedangkan terhadap dunia infra-human, manusia harus bersikap memanfaatkan dan bertindak mengelola dunia infra-human (binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda tak hidup). Namun harus dicamkan bahwa pemanfaatan melalui pengelolaan itu tidak boleh sewenang-wenang, karena sesungguhnya dunia infra-human itu merupakan penyangga utama kehidupan. Mengeksplotasi dunia infra-human secara berlebihan dengan mengabaikan konservasi berarti merusakkan kehidupan itu sendiri.

Di sinilah tampak bahwa dalam pandangan Pancasila, setiap pengada masing-masing memiliki dimensi substansialnya dan sekaligus saling berkorelasi. Maka, secara ontologis, “yang-tetap” ialah masing-masing pengada dalam kediriannya dan “yang-berubah” ialah dinamika korelasinya untuk meneguhkan masing-masing identitasnya. Secara etis, “yang-tetap” ialah komitmen manusia terhadap nilai eksistensial dari tiap-tiap pengada agar tetap disikapi dan ditindaki dalam semangat penghormatan, cinta kasih, dan kebersamaan. Sedangkan “yang-berubah” ialah praktik penanganan atau pelaksanaannya. Dinamika zaman merupakan peristiwa yang tak terelakkan, apalagi dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang membanjiri kehidupan hari demi hari seperti sekarang ini. Pembangunan di segala bidang mau tidak mau membutuhkan ilmu dan teknologi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendaliannya. Menolak ilmu dan teknologi berarti mengisolasi diri, dan itu berarti mundur ke belakang. Namun demikian, komitmen terhadap ketuhanan, kemanusiaan, persatuan/kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan tidak boleh surut dan terlena oleh gebyarnya ilmu dan teknologi dan merdunya rayuan pasar.

E. Penutup

Refleksi singkat sebagaimana telah digelar tadi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dalam pertikain pendirian antara mereka yang berpihak pada “yang-tetap” dan mereka yang berpihak pada “yang-berubah”, kedua-duanya memiliki kelemahan, karena “yang-tetap” dan “yang-berubah” sesungguhnya bukanlah merupakan dua kutub yang saling mengeksklusikan, melainkan justru saling berkoeksistensi dan saling mendinamisasikan satu sama lain demi kokohnya identitas dan keberlangsungan setiap pengada.

Kedua, Pancasila dalam kedudukannya sebagai *genetivus objectivus* menantang untuk diinterpretasikan terus-menerus dengan tidak pertama-tama harus mempertahankan “yang-tetap” sebagai sesuatu yang “amat keramat”, atau sebaliknya semata-mata hanya menginginkan agar “berubah”. Kedua-duanya merupakan sikap yang naif dan konyol. Sebagai simbol yang hidup, Pancasila harus senantiasa diaktualisasikan dan ditafsirkan dengan semangat keterbukaan, dialogal, dan tidak ada tempat bagi monopoli tafsir atasnya.

Ketiga, Pancasila dalam posisinya sebagai *genetivus subjectivus* memberikan jawaban atas persoalan pengelolaan dan pembangunan negara yang mau tidak mau harus selalu mengandaikan adanya perubahan. Apa “yang-tetap” ialah pengada itu sendiri dengan segala identitas dan perkembangannya; dan, itu berarti, eksistensinya. Implikasi etisnya ialah komitmen terhadap nilai yang melekat pada eksistensi pengada itu sendiri. “Yang-berubah” ialah cara penanganan atas pengada berserta teknik manajerialnya. Jadi, manajemen pembangunan harus tetap berkomitmen terhadap eksistensi pengada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, A., 1992, **Ontologi: Metafisika Umum**, Yogyakarta, Kanisius.
- Bertens, K., 1981, **Ringkasan Sejarah Filsafat**, Yogyakarta, Kanisius.
- _____, 1979, **Sejarah Filsafat Yunani**, Yogyakarta, Kanisius.
- De Vos, H., t.t., **Metafisika**, Terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta, Yayasan Pembina Fakultas Filsafat UGM.
- Dibyasuharda, 1990, **Dimensi Metafisik dalam Simbol**, Disertasi Belum Diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada..
- Notonagoro, 1980, **Pancasila Secara Ilmiah Populer**, Jakarta, Pancuran Tujuh.
- Pranarka, AMW., 1985, **Sejarah Pemikiran tentang Pancasila**, Jakarta, CSIS.

Soejadi dan Koento Wibisono, 1986, “Aliran-Aliran Filsafat dan Filsafat Pancasila” dalam Slamet Sutrisno (ed.), **Pancasila sebagai Metode**, Yogyakarta, Liberty.

Sontag, F., 1970, **Problems of Metaphysics**, Scranton Pennsylvania, Chandler Publishing Company.